

# DINAMIKA POLITIK LOKAL MENJELANG PEMILUKADA KOTA TASIKMALAYA

**Syah Firdaus**

Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Kampus No.1 Purwokerto 56112

firdausunsoed@yahoo.co.id

## **Abstrak**

Dinamika Pemilu Kota Tasikmalaya 2012 dalam perjalanannya melahirkan proses berdemokrasi yang menarik untuk dikaji. Satu hal yang membuatnya unik adalah adanya proses *bargaining position* antar kekuatan politik lokal di Kota Tasikmalaya. Kekuatan tersebut mengerucut pada upaya untuk mempopulerkan, mesin parpol, peningkatan kharisma, dan media yang memberikan kontribusi efektif bagi calon-calon tertentu dalam membentuk kekuatannya. Di sisi lain masyarakat sebagai calon pemilih sangat beragam dalam melihat pelaksanaan Pemilu, dari mulai yang antipati sampai yang antusias. Tentunya hal ini memberikan dinamika tersendiri yang secara detail dikaji dalam penelitian ini.

**Kata Kunci :** Pemilu, Kekuatan Politik, Persepsi Masyarakat, Dinamika Politik Lokal

## **Abstract**

*Tasikmalaya City election 2012 dynamics in the journey issued democratic process that interesting to be reviewed. One thing that make it unique is the bargaining position process between local political power in the city of tasikmalaya. That power conical on efforts to popularize, political party machines, increasing charisma and media that contributes effectively to specific candidates in shaping their power. On the other hand, public society as voters are very diverse in looking the implementation of local election, from their who antipathy to their who enthusiastic. Obviously this gives a detailed own dynamics studied in this research.*

**Keywords:** Local Elections, Political Power, Public Perceptions, Political Dynamics

Perhelatan Pemilu Kota Tasikmalaya tahun 2012 akan digelar pada bulan Juli 2012, namun demikian berbagai pihak sudah ramai membicarakan siapa kandidat Walikota/Wakil Walikota Tasikmalaya 2012-2016 yang akan datang. Berbagai tanggapan, pengamatan dan ramalan seringkali dilontarkan di media massa lokal sehingga menambah marak dan ramainya pemberitaan seputar pencalonan wali kota dan wakil wali kota. Jika salah satu syarat untuk kandidat Walikota/Wakilnya adalah popularitas dan pemimpin suatu parpol, adalah suatu hal yang terlalu dini

untuk diutarakan dan dijadikan syarat atau kriteria, karena popularitas seseorang tidak menjamin yang bersangkutan terpilih dan mendapatkan suara terbanyak. Disamping itu, KPU telah menetapkan berbagai syarat administratif untuk kandidat kepala daerah, disisi lain loyalitas, perilaku, sikap dan budaya pemilih tidak dapat dijadikan pegangan atau acuan dasar dalam perhitungan matematis suatu Parpol yang memiliki kursi terbanyak di dewan, atau koalisi parpol atas perhitungan minimal 15 % hasil suara pemilu. Masih banyak syarat dan kriteria lain bagi seorang

kandidat kepala daerah (Kota Tasikmalaya) untuk memperoleh dukungan masyarakat/pemilih, disamping itu seorang kandidat perlu memahami karakteristik masyarakat Kota Tasikmalaya yang pluralistik baik dari aspek status sosial ekonomi, kebiasaan/adat istiadat dan budaya, agama dan keyakinan, ras, keturunan, ikatan primordialisme, tempat tinggal/pola pemukiman, pekerjaan/profesi, karakteristik masyarakat dimaksud perlu dipahami oleh seorang kandidat pemimpin Kota Tasikmalaya. Karakteristik masyarakat dimaksud perlu dipahami oleh seorang kandidat pemimpin Kota Tasikmalaya. Sedangkan untuk kriteria pemimpin yang ideal untuk kota Tasikmalaya minimal memiliki kriteria sebagai berikut; (1) Kapasitas individu kandidat, dalam hal ini publik Kota Tasikmalaya harus jeli dalam memilih calon pemimpin, jangan terjebak pada kepopuleran semata; (2) Memiliki daya sentuh terhadap persoalan Kota Tasikmalaya, agar pemimpin Kota Tasikmalaya sebagai penentu kebijakan berpihak pada publik/rakyat banyak; (3) Memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat (*strong leader*), tegas dan semangat yang tinggi untuk membangun kota Tasikmalaya; (4) Memiliki otoritas/moralitas dalam memimpin tidak mengedepankan penampilan semata; (5) Memiliki kualitas dalam menentukan keputusan (*quality of judgment*), tidak tergantung pada figur junior atau senior, tanpa hal tersebut tokoh manapun tak layak disebut pemimpin; (6) Memiliki integritas yang tinggi dalam proses kepemimpinan dalam pemerintahan

di daerah maupun dalam masyarakat; (7) Memiliki Kapabilitas dan akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan daerah maupun kebijakan publik; (8) Memiliki visi ke depan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya.

Kriteria sebagaimana diuraikan di atas, memang sulit dimiliki oleh seorang kandidat Z1/Z2, namun demikian publik Kota Tasikmalaya menghendaki ada kandidat yang memenuhi kriteria minimal setengah dari kriteria di atas atau empat kriteria untuk kandidat pemimpin kota Tasikmalaya. Jika tidak memenuhi kriteria minimal, maka dengan segala hormat saya berharap kepada warga Tasikmalaya, untuk tidak mencalonkan sebagai Z1/Z2, karena dampaknya tidak baik bagi dirinya sendiri maupun bagi publik kota Tasikmalaya.

Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa: *pertama*; pemimpin yang baik di sebuah Daerah sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah dan *kedua*; perbaikan sistem rekrutmen calon kepala daerah berikut persyaratannya merupakan pilihan yang segera harus dilaksanakan. Sementara itu menurut pakar otonomi daerah UGM Prof. Dr. Pratikno, menyatakan bahwa dalam rekrutmen calon kepala daerah ada 2 hal prinsipil yang perlu diperhatikan yaitu faktor teknokratis dan faktor demokratis. Faktor teknokratis disini adalah pemimpin yang memiliki kompetensi dibidang pemerintahan dengan managerial skill dan tehnikal skill sesuai kebutuhan, selanjutnya dapat *manage* organisasi pemerintahan secara baik.

Sedangkan faktor demokratis adalah bahwa pemimpin harus dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serta mendukung proses demokratisasi di daerah. Pendapat Pratikno ini didasarkan atas asumsinya bahwa masalah bangsa saat ini memang sudah parah sehingga memerlukan terobosan yang luar biasa salah satunya adalah memperketat persyaratan calon pemimpin daerah. Jika syarat yang agak longgar sekarang ini tetap dipertahankan dikhawatirkan pada gilirannya daerah akan dipimpin oleh pemimpin yang memiliki popularitas namun miskin moralitas. Pemimpin daerah tidak mampu memenej pemerintahan sehingga tujuan otonomi daerah hanya menjadi utopia belaka dan ujung-ujungnya rakyat juga yang menjadi korban. Bukankah tujuan otonomi daerah itu sendiri adalah pertama; bagaimana menjadikan Pemerintah Daerah sebagai instrument untuk menciptakan kesejahteraan dan kedua; bagaimana menjadikan Pemerintah Daerah sebagai instrument pendidikan politik ditingkat lokal untuk mendukung proses demokratisasi menuju masyarakat sipil (*civil society*).

Fenomena proses Pemilukada di berbagai daerah di tanah air, perlu menjadi cermin bagi proses pemilukada Kota Tasikmalaya, oleh karena proses demokratisasi dalam pemilukada menjadi metamorfosa demokrasi transaksional, demokrasi substansial hanya menjadi retorika politik dan manajemen pemilukada oleh kandidat, tim sukses, lembaga/institusi penyelenggara pemilukada. Publik kota

Tasik sangat berharap pemilukada 2012 dapat berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat Kota Tasikmalaya.

### **Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah dinamika politik lokal dalam menjelang Pilkada Kota Tasikmalaya 2012 dengan membidik dua masalah utama yakni : (1). Bagaimana peta kekuatan politik yang terbentuk?, dan (2) bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada mendatang?

### **Dinamika Pemilu Lokal dan Nasional : Beberapa Pendekatan**

Dinamika politik nasional Indonesia mulai terasa ketika gerakan demokratisasi digulirkan pada tahun 1997 oleh kalangan mahasiswa, kemudian melahirkan suksesi kepemimpinan pada tahun 1998 yang dikatakan sebagai tonggak awal gerakan demokrasi di Indonesia (Philpott, 2003:1). Tuntutan Reformasi menghendaki adanya perubahan yang mendasar terhadap tatanan kehidupan sosial-politik yang demokratis dengan menempatkan kedaulatan ada ditangan rakyat. Upaya ini diantaranya dilakukan melalui perubahan sitem demokrasi perwakilan dengan model pemilihan tidak langsung menjadi demokrasi langsung. Pada sistem demokrasi tidak langsung pimpinan ditingkat nasional (Presiden dan Wakil Presiden) maupun di tingkat lokal (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) dipilih oleh

legislatif atas nama rakyat. Mekanisme pemilihan seperti itu telah menimbulkan kecaman dan kekecewaan rakyat karena lazim menimbulkan praktik-praktik yang cenderung mereduksi kedaulatan rakyat, adanya praktik *money politics*. Penerapan demokrasi perwakilan dengan model pilihan tidak langsung yang selama ini dilaksanakan telah melahirkan rezim pemerintahan sentralistik-otoriterian yang mengebiri hak dan kedaulatan rakyat. Melalui Reformasi rakyat menghendaki dikembalikannya kedaulatan rakyat yang telah lama terpasung. Sistem demokrasi langsung diharapkan mampu mengembalikan kedaulatan rakyat. Rakyat diberikan keleluasaan untuk menentukan pemimpin yang dikehendaki melalui pemilihan secara langsung.

Melalui mekanisme pemilihan langsung diharapkan dapat mengembalikan kedaulatan rakyat, memperkuat hak dan kewajiban politik rakyat yang pada akhirnya dapat melahirkan pemimpin yang memiliki kapabilitas, konstituensi, dan legitimasi serta integritas<sup>1</sup>. Begitupun diharapkan dapat membuka sumbatan-sumbatan demokrasi yang sudah macet bertahun-tahun, sehingga menjadi momentum melakukan terobosan menuju tradisi baru demokrasi lokal<sup>2</sup>. Cita-cita untuk membangun Indonesia baru, yakni Indonesia yang lebih demokratis, dengan mengembalikan kedaulatan

ke tangan rakyat<sup>3</sup> dapat diwujudkan. Keinginan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis, dilakukan melalui *constitutional reform* yakni amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa hal mendasar yang dihasilkan dalam amandemen tersebut, yang diyakini menjadi dasar penegakan demokrasi di Indonesia. Peran dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara akan tetapi sebagai lembaga negara yang kedudukannya sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Begitupun keanggotaan MPR terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum (pemilu) legislatif oleh rakyat. Begitupun presiden dan wakil presiden yang awalnya dipilih MPR, melalui amandemen UUD 1945, sejak pemilu tahun 2004 dipilih secara langsung melalui pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Perubahan ini memberikan pemaknaan baru terhadap struktur dan kultur politik nasional dan lokal yang dapat memberikan arah perubahan peta sosial dan politik. Secara struktural, terjadi perubahan terhadap peran, kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga negara, sedangkan secara kultural, dikembangkannya tradisi politik baru yakni pemilihan legislatif dan eksekutif secara langsung oleh

<sup>1</sup> Kleden dan Syamsuddin Haris, *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005)

<sup>2</sup> Pradhanawati, *Pilkada Langsung : Tradisi Baru Demokrasi Lokal*, (KOMPIP, Semarang, 2005), hlm. 10

<sup>3</sup> Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), hlm.51

rakyat. Proses demokratisasi yang hendak dikembangkan tidak berhenti sampai disitu. Keberhasilan Pemilu 2004 melalui pemilihan Presiden secara langsung, menjadi inspirasi untuk mengembangkan proses demokrasi ke aras lokal. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, merupakan kelanjutan dari proses reformasi dengan menempatkan desentralisasi pemerintahan dan demokratisasi dalam pengaturan politik lokal dengan dipilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh rakyat di daerah (pilkada) secara langsung.

Perubahan pengaturan politik lokal melalui pilkada langsung dapat mempengaruhi sistem nilai dan budaya politik lokal yang selama ini menjadi ideologi masyarakat di daerah. Demokrasi langsung sebagai eksperimen modernitas pada tingkat global, merupakan tradisi besar yang akan saling silang-menyilang, berinteraksi dengan nilai-nilai tradisi pada masyarakat lokal sebagai tradisi kecil. Adanya silang budaya antara tradisi besar (globalisasi) dengan tradisi kecil (lokalisasi), membawa arus yang paradoksial dalam struktur sosial Indonesia. Satu arus menarik bangsa Indonesia ke “norma dunia”, sementara arus yang lain justru melahirkan penguatan kelompok etnis, bahkan melakukan nasionalisme etnis. Sedangkan menurut Nashir ekspansi budaya global justru menyebabkan meningkatnya kesadaran terhadap budaya lokal dan regional.

Proses demokrasi langsung melalui

Pilkada merupakan penetrasi tradisi besar yang hendak dilaksanakan dalam komunitas lokal. Dalam implementasinya, penerapan sistem pemilihan kepala daerah langsung telah memunculkan pandangan yang dualistis antara mereka yang pesimistis dengan yang optimistis (Oka Mahendra, 2005). Ada dua alasan mendasar yang dapat dikemukakan dalam menyikapi pergeseran format politik lokal, yakni alasan akademis dan alasan praksis.

Menurut Anderson secara akademis perkembangan ilmu politik mutakhir termasuk studi politik di Indonesia menunjukkan perdebatan tentang konsep demokrasi yang berlangsung secara dikotomis antara demokrasi Schumpeterian dengan pengkritiknya. Para penganjur demokrasi Schumpeterian merumuskan demokrasi sebagai sebuah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan-keputusan dimana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif memperoleh suara rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi ini tidak hanya diyakini secara kuat dalam dunia akademik, melainkan sudah menjadi rujukan utama dalam praktik politik dan pemerintahan di Indonesia.

P e n d e k a t a n d e m o k r a s i Schumpeterian yang hanya menekankan pada dimensi *electoral* dan lembaga perwakilan menimbulkan sanggahan dari berbagai kalangan. Menurut Teri Karl, disamping dimensi *electoral*, perlu memperhitungkan secara serius dimensi-dimensi *non-electoral* seperti kebebasan sipil. Bagi kaum

liberal, demokrasi memberikan jaminan kebebasan yang tak tertandingi oleh sistem politik manapun (Dwipayana, 2004: 3). Perkembangan sosial modern kolaborasi antara modernitas sebagai ciri masyarakat modern dengan tradisi yang membingkai masyarakat akan bermuara salah satunya dalam penyelenggaraan pilkada langsung ini adalah suatu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dalam dinamika politik lokal. Menurut Jimung (2004: 25) dinamika politik lokal merupakan sesuatu yang penting, didalamnya terdapat penghargaan dan perspektif yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Setiap daerah tidaklah mungkin memiliki pengaruh politik yang sama oleh karena kekuasaan dan sumber-sumbernya menyebar ke berbagai simpul begitupun perjuangan berbagai kelompok masyarakat dalam memperebutkannya.

Arena pilkada langsung sebagai wahana interaksi dan relasi kekuasaan yang semakin rumit. Dalam teori kekuasaan menurut Foucault, kekuasaan harus dipahami sebagai sesuatu yang bermakna banyak dan beragam hubungan dalam masyarakat, tidak bisa dilokalisasi pada tempat tertentu menjadi milik seseorang, sehingga memerlukan strategi kompleks untuk mendapatkannya. Peta politik baik yang bersifat nasional maupun lokal dalam konteks ini akan dapat dibedah dari proses politik pemilu.

Heinelt dan Wollmann<sup>4</sup> (1991) mendefinisikan politik lokal sebagai suatu sense dalam pembangunan dan

penghargaan secara sosial yang berupa keputusan-keputusan dalam sistem interaksi berdasarkan fisik dan ruang sosial. Sementara Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah).

Berbicara tentang politik lokal akan terkait dengan kekuasaan yang digunakan untuk memimpin suatu masyarakat tertentu. Di mana kekuasaan itu tidak hanya didasarkan pada kemampuan tetapi juga oleh faktor lain yang memiliki kaitan dengan keberadaan masyarakat atau daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu ada dua faktor yang mempengaruhi kehidupan politik lokal masyarakat Indonesia, pertama munculnya agenda pemekaran wilayah atas dasar asumsi-asumsi etnisitas yang lebih spesifik, sebagai salah satu indikasi penguatan identitas terhadap wacana demokrasi lokal.

### **Kerangka Pemikiran Penelitian**

Pada tanggal 9 September 2007, pasangan Drs H Syarif Hidayat-Ir H Dede Sudrajat dipastikan menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya periode 2007-2012 setelah berhasil meraih suara terbanyak, yakni 118.050 suara dalam Pilkada Kota Tasikmalaya. Raihan tersebut terpaut satu persen lebih dari perolehan suara yang diraih pasangan Drs

H Bubun Bunyamin-H Noves Narayana SE sebanyak 113.363 suara. Sedangkan pasangan Drs H Budi Budiman-dr H Wahyu Sumawijaya meraih 102.822 suara. Penghitungan dengan *quick count*, kendati proses penghitungan suara tersebut bersifat tidak resmi, menurut Ketua KPU Kota Tasikmalaya, Drs Cholis Mukhlis, tingkat akurasinya bisa dipertanggungjawabkan. Pasalnya, penghitungan sistem *quick count* tetap bersumber dari seluruh TPS. Jumlah total suara dari ketiga pasang kandidat tersebut sebanyak 334.235. Itu berarti ada sebanyak 74.232 suara yang tidak digunakan pemilih dengan jumlah total 408.467 orang. Sisa suara yang tidak digunakan itu terdiri dari suara tidak sah, golput, serta warga yang tidak mendapatkan kartu undangan. Pada awalnya pasangan H Bubun dan H Noves mendapat apresiasi yang besar di berbagai kalangan, mengingat pasangan tersebut memiliki popularitas dan merupakan incumbent serta atasan dari H Syarif Hidayat. Namun realitas politik menunjukkan hal yang berbeda dengan asumsi dasar dimaksud.

### **Kekuatan Politik Menjelang Pemilukada Kota Tasikmalaya**

Studi tentang pemetaan kekuatan politik dalam Pemilukada salah satunya memiliki manfaat untuk melihat prospek kemenangan satu calon tertentu. Selain itu juga mampu menjadi bahan studi literatur dalam “meramalkan” secara ilmiah kecenderungan kemenangan calon tertentu. Banyak cara yang dilakukan

untuk memetakannya termasuk melalui survei elektabilitas dan popularitas calon, kekuatan mesin Parpol, keberpihakan dan ekspos media, basis massa dan ketokohan (kharisma), dan faktor lain yang dalam hal tertentu menjadikan perilaku pemilih sulit ditebak secara akurat (mutlak).

Banyak teori yang menjadi *frame* dalam memetakan kekuatan politik di suatu komunitas atau wilayah tertentu. Salah satu teori yang dimaksud tersebut adalah bahwa kekuatan politik calon sangat dipengaruhi oleh : *pertama, political behavior condition*, yaitu kekuatan politik seorang calon atau elit politik sangat ditentukan oleh perilaku politik yang bersifat aktual (*actually political behavior*) yang didalamnya mencakup *daily politics* (partisipasi politik terkini) dan momentum, yang di dalamnya terdiri dari *voting behavior* dan *voting turn out* (kecenderungan menurunnya partisipasi). Selain yang bersifat aktual, juga sangat ditentukan oleh perilaku non-aktual yang didalamnya termasuk budaya politik masyarakat yang bersangkutan dan pembentukan opini publik dalam jangka waktu lama lewat media<sup>5</sup>.

*Kedua*, popularitas, kharisma dan wibawa calon yang bersangkutan. Faktor inipun tidak bisa dikesampingkan dalam melihat kekuatan seorang calon dalam Pemilukada. Dalam dataran tertentu bahkan seorang calon yang memiliki popularitas baik dapat mengalahkan kekuatan mesin Parpol. Dalam konsep penelitian ini

<sup>5</sup>Newton, Ken and Van Deth, Jan W. (2005) *Foundations of Comparative Politics*, (Cambridge University Press. Cambridge, 2005), hlm. 126

popolaritas disatukan dengan kharisma dan wibawa dikarenakan kharisma dan wibawa (baik yang berasal dari sumber formal dan informal) akan efektif jika keberadaan calon yang bersangkutan dikenal sebagai seorang yang kharismatik dan berwibawa. Pemimpin yang populer menurut Koentjaraningrat<sup>6</sup> adalah pemimpin yang dikenal masyarakat sebagai aktor yang memiliki sifat-sifat yang disenangi dan dicita-citakan oleh banyak orang (konstituen).

*Ketiga*, ekspos dan keberpihakan media. Manfaat pemilih yang didapatkan dari ekspos media dalam konteks pengenalan calon sehingga berpengaruh terhadap kekuatan suatu calon adalah terbentuknya isu politik yang didapat dari info, baik *converting* (berfungsi merubah persepsi pemilih) atau *re-inforcing* (menguatkan pilihan sebelumnya). Informasi-informasi media (baik isu, kandidat, atau *traits personality of candidat*) dapat memperngaruhi kesadaran (*awareness*) seseorang dalam menentukan pilihan<sup>7</sup>.

*Keempat*, mesin Parpol yang mengusung calon yang bersangkutan. Tentang hal ini sudah tidak diragukan lagi kebenarannya, walaupun tidak mutlak, namun kemenangan calon sangat dipengaruhi oleh komitmen dari konstituennya untuk secara ideologis memilih calon yang diusung oleh yang bersangkutan. Salah satu contoh bukti tentang hal ini adalah kemenangan Partai Dominan PPP di Kabupaten Tasikmalaya

yang mengusung kadernya UU Ruzhanul 'Ulum sebagai bupati. Kelima, basis masa ideologis yang bersangkutan sebagai modal sosial aktivitas kemasyarakatan yang ia jalani selama ini. Misalnya aktivis Ormas, LSM, atau organisasi lainnya yang memiliki anggota atau simpatisan tersebar di mana-mana.

### **Kekuatan Politik Calon dan Kecenderungan Perilaku Pemilih Kota**

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa kekuatan politik sangat dipengaruhi oleh perilaku pemilih konstituennya. Perilaku pemilih dapat berubah dalam sekejap (aktual) dan dapat pula membutuhkan waktu (non-aktual). Perubahan yang aktual sangat dipengaruhi oleh kekuatan promosi dalam bentuk kampanye dan pengenalan visi-misi (banner, spanduk, baligo), pemberitaan media, dan program-program populis lainnya. Selama ini tim Koalisi Masyarakat Madani (KMM) yang digawangi oleh partai dominan semisal Partai Persatuan Pembangunan sejak awal (1,5 tahun) menjelang Pemilu pada merupakan kelompok yang paling semangat dan gencar dalam sosialisasi melalui media tersebut. Sejak bulan Agustus 2011 lalu pengenalan visi misi calonnya H. Budi Budiman bertebaran di Kota Tasikmalaya.

Selain calon tersebut juga terdapat calon lainnya yang juga incumbent, H. Syarif Hidayat yang memasang banyak spanduk, baligo yang mengenalkan program lanjutan, prestasi yang selama ini diraih sehingga menghasilkan berbagai penghargaan dari

<sup>6</sup> Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (PT. Dian Rakyat: Jakarta, 1980), hlm. 195

<sup>7</sup> Newton, *Ibid.*, hlm. 128



Presiden RI. Calon ini memang tidak secara langsung memasang kampanye visi-misinya secara terbuka, namun lewat iklan layanan masyarakat seperti himbauan dan pesan untuk warga masyarakat Tasikmalaya. Selain calon-calon tersebut juga terdapat calon-calon lainnya seperti Heri Hendriyana dari PAN, Noves Narayana dari Golkar, Dede Sudrajat, D. Romdoni dan lainnya yang jumlahnya tidak semasif kedua calon di atas.

Selain pengenalan-pengenalan lewat *banner*, *baligo*, dan sejenisnya diantara beberapa calon juga melakukan pengenalan lewat media maya (internet). Bakal calon H. Budi Budiman misalnya membuka web site pribadinya dan media *facebook fun page*, khusus untuk memasifkan program dan pengenalan kepada masyarakatnya. Calon calon lain juga sama semisal H. Dede Sudrajat, MP yang secara khusus membuat situs pribadinya<sup>8</sup>.

Secara teoritis calon pemilih harian akan berubah-ubah tergantung seberapa gencar pengenalan yang dilakukan oleh calon dan tim suksesnya. Melalui wawancara dengan salah seorang petinggi Koalisi Peduli Umat (Dede Abdul Karim, sekretaris Desk Pilkada PKS) mengakui bahwa “jago” dari Koalisi Peduli Umat dinilai paling massif dalam upaya pengenalan visi

---

<sup>8</sup> *web site* pribadi H. Budi Budiman adalah <http://budibudiman.com>, sedangkan H. Dede Sudrajat adalah <http://dedesudrajat.com>, calon lain juga ada yang memasang *facebook fun page*. Sedangkan incumbent H. Syarif lebih menggunkan media instansi situs di <http://tasikmalaya.go.id>

misinya kepada masyarakat dalam berbagai media. Baik pengenalan secara langsung, maupun pengenalan secara langsung lewat media-media *banner*, spanduk, koran dan internet.

Pendapat serupa juga disebutkan oleh Ramdani anggota Desk Pilkada “pentolan” Koalisi Masyarakat Madani (KMM) yang menganggap bahwa timnya sangat gencar dalam upaya pengenalan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kalau dilihat dari hal ini, kemungkinan besar akan mempengaruhi perilaku pemilih target yang selama ini kurang mengenal figur H. Budi Budiman.

Memang jika dilihat dari massifikasi visi misi dan kepribadian dan data-data yang diambil secara *puposive* dan data-data media secara jelas terlihat *main-stream* kekuatan yang relatif berimbang antara tiga kekuatan dominan yang nantinya akan bersaing yakni Syarif Hidayat sebagai incumbent, Budi Budiman dan Dede Sudrajat. Namun konstelasi berubah di akhir Februari 2012 kemarin karena ternyata Dede Sudrajat “merapat” kepada Budi Budiman, sebagai calon wakil wali kota.

### **Kekuatan Popularitas dan Kharismatik Calon**

Popularitas yang dipahami dalam penelitian ini adalah pengetahuan masyarakat akan calon tertentu dan kelebihanannya yang membuat figur tersebut memiliki potensi untuk disukai dan cita-citakan oleh pemilih. Diantara bakal calon-bakal calon yang muncul terdapat tokoh-tokoh lama yang “bersemi” lagi. Selain calon lama,

Pemilukada juga semakin dinamis dengan munculnya nama-nama baru yang akan ikut bertarung dalam pemilukada tahun 2012. Nama-nama baru tersebut antara lain; H. Heri Hendriyana (PAN), Ust. Heri Ahmadi (PKS), Deni Romdoni (PDIP), nama-nama baru tersebut memiliki tingkat popularitas yang rendah jika dibanding dengan nama-nama lama yang pernah bersaing di Pilkada tahun 2007 lalu.

Koalisi yang sudah terbangun yaitu Partai PPP, PBR, PBB dan PAN sudah mengusung H. Budi Budiman untuk Cawalkot, untuk calon Wali kota kemungkinan terbesar adalah Dede Sudrajat, MP setelah adanya keputusan tokoh ini untuk “merapat” ke Budi. Pengusungan nama calon walikota seperti ; H. Budi Budiman, H. Syarif Hidayat, H. Wahyu, H. Dede Sudrajat, H. Noves dan H. Bubun, nama-nama tersebut adalah nama calon walikota/wakil walikota tahun 2007, sehingga calon-calon tersebut adalah pemain lama yang diusung kembali oleh partainya atau oleh gabungan partai.

“Pemain lama” ini disisi lain memiliki kelebihan bahwa mereka lebih populer, dan jika mereka memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang baik tentu saja akan diingat dan disukai oleh calon pemilih. Namun disisi lain calon lama ini tidak memberikan perspektif politik baru, mengingat masyarakat Kota Tasikmalaya sudah faham betul akan reputasi, latar belakang, kualitas, kapasitas dan tingkat elektabilitasnya.

Menurut salah satu informan dari

Koalisi Peduli Umat (Dede Abdul Karim) mengatakan bahwa kalau yang dimaksud dengan popularitas tersebut adalah keterkenalan calon yang bersangkutan di mata masyarakat maka jawabannya kemungkinan besar adalah calon lama semisal Budi Budiman, Syarif, Dede, Noves, H. Wahyu. Namun hal tersebut juga bukan jaminan, karena belum tentu calon baru juga tidak populer di mata masyarakat. Calon-calon baru yang muncul saat ini mungkin saja populer jika pengenalannya baik. Tapi fakta di Kota Tasikmalaya popularitas mereka kurang, sehingga mereka juga tidak berani mencalonkan diri sebagai wali kota, sebagian calon baru yang muncul lebih bersiap menjadi “pendamping” calon lama. Contohnya Deni Romdoni, Heri Hendriyana, dan Heri Ahmadi dari PKS.

Ukuran yang sedikitnya mendekati valid untuk melihat tingkat popularitas pemimpin adat hasil survai lembaga terpercaya dan kompeten. Dengan metode yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah akan menghasilkan kesimpulan yang mendekati kebenaran dengan rata-rata margin error kecil. Menurut Dede Abdul Karim, survey mengenai popularitas calon pernah dilakukan oleh dua institusi survey ternama di Indonesia yaitu Lingkaran Survai Indonesia dan Lingkar Survai Indonesia. Kesimpulan kedua LSI yang berbeda pimpinan tersebut memiliki sedikit perbedaan. Walaupun keduanya berbeda tipis dalam prosentase popularitas, yakni yang satu berkesimpulan H. Budi sedikit

lebih populer dibanding H. Syarif, di sisi lain H. Syarif lebih unggul tipis atas H. Budi. Namun yang pasti keduanya merupakan dua kekuatan dominan calon wali kota paling populer dalam survey tersebut.

Hasil survey tersebut memang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, namun ketika berbicara perilaku pemilih, hal tersebut menjadi serba belum pasti. Karena seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan tentang perilaku pemilih masyarakat, dalam waktu sekejap mereka dapat berubah pikiran lewat faktor tertentu. Namun sebagai pemetaan sah-sah saja kemudian dari beberapa informasi koran (*Radar Tasikmalaya*)<sup>9</sup>, informasi dari informan utama dan pembanding menemukan *main-stream* kekuatan calon wali kota yang paling populer sampai saat ini dipegang oleh dua kekuatan besar, yakni : Budi Budiman dan Syarief Hidayat. Kekuatan Budi-Budiman bahkan diprediksikan bertambah besar setelah di akhir Februari 2012 kemarin menyatakan bergabung dengan Koalisi Masyarakat Madani (KMM) dan akan mendampingi H. Budi Budiman.

Sedangkan mengenai kharismatika atau pemimpin dengan sumber wewenang yang didasarkan pada kharisma, yaitu suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Kemampuan khusus ini melekat pada seseorang dan bersifat *given*, dalam

arti pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Orang-orang di sekitarnya mengakui akan adanya kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan mitos (*taklid*), karena pada dasarnya mereka menganggap bahwa sumber dari kemampuan tersebut adalah sesuatu yang berada di atas kemampuan dan kekuasaan manusia pada umumnya (Weber dalam Robbins, 1996:16). Kharismatik oleh karena itu biasanya cenderung diturunkan dari ayah atau ibu yang sebelumnya dianggap kharismatik. Oleh karena itu kharismatik akan sangat dipengaruhi oleh budaya yang berlaku di daerah tersebut. Contoh nyata tentang hal ini adalah kemenangan mutlak Tuan Guru Abdul Madjdi Bajang atas Lalu Serinata, incumbent dari Partai Berkuasa, Partai Golkar. Tuan Guru merupakan pemimpin Nahdatul Watan berusia muda keturunan tokoh kharismatik pendiri Nahdhatul Watan di Nusa Tenggara Barat.

Dalam konteks Tasikmalaya yang basis kulturalnya Nahdhatul ‘Ulama dan pesantren tentunya tokoh-tokoh yang memiliki keturunan “darah biru” dari institusi tersebut memiliki peluang yang sangat besar. Kemenangan UU Ruzhanul Ulum dalam pemilihan bupati Tasikmalaya 2010 silam boleh jadi memiliki hubungan erat dengan kharisma ayah dan terutama kakek beliau yang merupakan ulama paling berpengaruh di Tasikmalaya. Dari sisi ini beberapa tokoh memiliki modal sosial yang terkait dengan hal ini semisal Noves yang “darah biru” karena merupakan anak dari H. Adang Roosman, tokoh masyarakat Tasikmalaya, mantan bupati yang sangat

<sup>9</sup> Radar Tasikmalaya merupakan salah satu koran lokal grup Jawa Pos yang paling banyak mengekspos proses Pemilukada Kota Tasikmalaya. Bahkan kurang lebih 4 bulan kebelakang koran ini menyediakan lembaran khusus membahas dinamika Pemilukada.

disegani dan kharismatik.

### **Ekspos dan Keberpihakan Media**

Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan *frame* penelitian sebelumnya, bahwa informasi media tentang calon akan perlahan atau cepat mampu menguasai kesadaran (*awareness*) dari calon pemilih. Informasi tersebut dapat mengubah (*converting*) keputusan *voting behavior* seseorang atau menguatkan pilihan sebelumnya (*reinforcing*).

Ada beberapa media yang selama ini cukup intens melakukan pemberitaan dinamika Pemilu Kota Tasikmalaya, diantaranya Koran Priangan, Pikiran Rakyat, Tasik Plus, Radar Tasikmalaya, Galamedia dan Radar TV. Dari keseluruhan media tersebut yang paling gencar memberitakan Pemilu dan kekuatan calon adalah Radar Tasikmalaya. Radar secara konsisten menjadi media terdepan dalam memberikan informasi mengenai Pemilu Kota Tasikmalaya. Peneliti secara khusus mengikuti pemberitaan Radar Tasikmalaya dari mulai bulan September 2011 sampai saat ini.

Dalam setiap edisi pemberitaan Radar selalu ditampilkan dinamika tarik ulur dan manuver bagi-bagi kekuasaan. Saat itu baru muncul figur-figur yang akan mencalonkan seperti H. Budi, H. Wahyu Sumawijaya, dan Bubun Bunyamin (Mantan Wali Kota Tasikmalaya sebelum Syarif). Di periode Bulan Agustus-November muncul elit-elit dan perwakilan elit dari koalisi PPP, PBR dan PBB (Koalisi Masyarakat Madani)

yang akan mencalonkan H. Budi Budiman sebagai wali kota dari PPP, koalisi PDI-P, Gerindra, PKB yang mengusung calon wali kota H. Dede Sudrajat. Sedangkan partai yang belum berkoalisi Golkar mencalonkan H. Noves Narayana, PAN terpecah ada yang mengusung H. Syarif Hidayat dan Heri Hendriyana, Partai Demokrat mengusung H. Wahyu Sumawijaya, PKS mengusung H. Heri Ahmadi.

Pemberitaan selanjutnya (periode November 2011-Januari 2012) selain pemberitaan standar dan manuver-manuver kecil bagi-bagi kekuasaan dan *bargaining-position* semisal PDI-P dan Golkar yang mendekati H. Dede serta (Koalisi 21) juga diwarnai dengan terpecahnya dukungan PAN antara tetap bergabung dengan KMM dengan mengusung Heri Hendriyana sebagai calon wakilnya H. Budi atau keluar dari KMM dengan mengusung H. Syarif seperti yang diamanahkan pengurus pusat PAN. Selain itu juga mulai munculnya keinginan dan suara calon independen semisal tokoh Mumung Martasmita, Taufik Faturrohman dan lainnya.

Pemberitaan selanjutnya (periode pertengahan Januari 2012- sekarang) dinamika selain dihiasi oleh pasangan calon independen yang menyerahkan persyaratan dukungan minimal 4% juga dikejutkan oleh manuver H. Dede Sudrajat yang menyatakan “merapat” ke H. Budi Budiman. Di akhir Februari beliau menyatakan akan mendampingi Budi Budiman sebagai wakil wali kota. Selain itu juga, Kamis malam (08 Maret 2012) dikejutkan juga dengan

berpindahnya Partai Demokrat yang sebelumnya merapat ke KMM menjadi menyatu ke Koalisi Peduli Umat bersama PAN, PKS dan Golkar dan Koalisi 21 (PDI-P, Gerindra dan PKB).

Pemberitaan-pemberitaan media kemudian secara nyata mengkerucut pada dua kekuatan besar yakni calon dari Koalisi Masyarakat Madani (KMM) yang dihuni PPP, PBR dan PBB yang mengusung Drs. H. Budi Budiman dan Ir. H. Dede Sudrajat, MP dan kekuatan satunya lagi adalah Koalisi Peduli Umat yang bergabung dengan Koalisi 21 yang dihuni PAN, PKB, P-Demokrat, PKS, Golkar, PDI-P dan Gerindra mengusung H. Syarif Hidayat yang sampai saat ini pasang wakil wali kotanya belum disahkan. Sedangkan kekuatan independen dinilai kurang populis, hanya selintas kurang bahkan kurang masif.

### **Peta Kekuatan Mesin Parpol**

Menurut informan dari perwakilan akademisi, dikatakan bahwa Parpol boleh jadi dapat menjadi mesin Parpol yang efektif untuk memenangkan pemilihan, namun di sisi lain Papol juga dapat tidak berpengaruh pada kemenangan satu calon tertentu. Dalam satu kondisi Parpol bisa menjadi kekuatan jika didukung dengan manajemen tim sukses yang baik dan mampu mempopularkan calon sehingga mampu mendongkrak suara. Namun disisi lain juga parpol dapat tidak berarti apa-apa dalam konteks pemilihan langsung. Hal ini terjadi karena pada dasarnya yang akan dipilih oleh masyarakat nantinya adalah

figur calon

Sebagai contoh PDI-P sebagai partai politik pemenang Pemilu legislatif 2004 yang mendapat 29.82 persen suara mengajukan Bibit Waluyo, pensiunan perwira tinggi TNI, yang berpengalaman, namun kurang dikenal di pemilih Jawa Tengah mampu mendongkrak popularitasnya di mata pemilih. Apalagi dengan disandingkan figur yang selama ini sangat mengakar, berpengalaman yang merintis karir kepartaian dari bawah sebagai kader PDI-P yakni Rustriningsih (mantan Bupati Kebumen) semakin memantapkan pasangan ini “mengambil hati” konstituen partai khususnya, bahkan publik Jawa Tengah umumnya dan mampu memenangkan pemilihan mencapai 73.9% (LSI, 15 Juli 2008). Keadaan efektifnya mesin partai besar dalam memenangkan pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah, justru terjadi sebaliknya di Nusa Tenggara Barat. Pilkada yang diikuti oleh pasangan calon : Lalu Serinata-Husni Djibril (Golkar, PDI-P, PBR dan Partai Patriot Pancasila), M. Zainul Madjdi-Bachrul Munir (PBB dan PKS), Zaini Arony-Nurdin Ranggabarani (PAN, PD, Partai Syarikat Indonesia dan PKPB) dan Nanang Samodra-Muhammad Jabir (PPP dan PKB) dimenangkan oleh pasangan Tuan Guru Bajang Zainul Madjdi-Bahrul Munir (38,84%), disusul Lalu Serinata-Husni Djibril (26,39%). Kekalahan ini menarik dikaji, karena pasangan Lalu-Husni merupakan pasangan yang didukung Golkar, partai pemenang pemilu legislative mencapai 24.86 %, PBR (7.51%), PDI-P

(6.98%) sedangkan Zainul Madjdi-Bacrul Munir hanya didukung PBB (Pemilu legislatif mendapat 10.24% suara), dan PKS (6,06 %).

Dalam konteks Kota Tasikmalaya, jika kita berpedoman bahwa Parpol akan berpengaruh terhadap perolehan suara, maka Koalisi Masyarakat Madani memiliki kekuatan 15 kursi di DPRD, dengan rincian ; Fraksi Persatuan Pembangunan sebanyak 8 kursi, Fraksi Partai Bintang Reformasi 4 kursi, dan Fraksi Bulan Bintang 3 kursi. Sedangkan gabungan Koalisi Peduli Umat dan Koalisi 21 adalah 30 kursi. Dari hitungan kekuatan ini Koalisi Peduli Umat memiliki peluang lebih besar dari segi kekuatan mesin parpol, jika itu efektif melahirkan konstituen yang ideologis. Namun hal ini hanya hitungan dari jumlah kursi yang sudah disederhanakan dari pilihan konstituen.

Kekuatan ini tentu saja masih riskan, karena Parpol memiliki tugas berat tidak hanya menjaring calon, namun harus mampu mempopulerkan calon lewat sosialisasi politik yang efektif. Jika hal ini mampu dijalankan maka kasus kemenangan partai dominan semisal kasus di Jawa Tengah dapat menjadi prediksi ilmiah kemenangan calon yang diusung partai dominan. Namun jika Parpol tidak mampu memasifkan calonnya, maka kasus kekalahan partai dominan seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur akan terjadi dalam Pemilukada Kota Tasikmalaya.

### **Respon Masyarakat Terhadap**

### **Pelaksanaan Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012**

Proses demokrasi pada prinsipnya menggunakan tingkat partisipasi masyarakat sebagai tolok ukur apakah sebuah kontestasi politik baik ditingkat nasional maupun lokal bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan bisa diterima oleh mayoritas masyarakat. Walaupun indikator tingkat partisipasi masyarakat ini masih bisa diperdebatkan dan diperbandingkan, karena indikator berhasil tidaknya sebuah pemilihan kepala daerah tidak hanya menggunakan pendekatan kuantitatif tapi pendekatan kualitatif sebagai faktor yang berpengaruh yang menentukan apakah sebuah pemilihan kepala daerah berkualitas atau tidak. Pendekatan kualitatif ini menitikberatkan pada berbagai faktor yang saling terkait, seperti sejauh mana kualitas calon kepala daerah yang akan bertarung, kompetensinya dalam hal kepemimpinan, kredibilitas partai politik lokal, tingkat pendidikan/kecerdasan politik masyarakat dan satu hal yang tidak kalah penting adalah tingkat kecurangan yang terjadi.

Berdasarkan asumsi tersebut, penelitian ini mencoba ingin mengetahui sejauh mana respon masyarakat Kota Tasikmalaya dalam menyikapi pemilihan Wali Kota pada 2012. Pengertian respon pada penelitian adalah sebagai asumsi dasar yang akan menjadi dasar untuk menjawab dua pertanyaan sekaligus, yaitu tingkat partisipasi dan tingkat kualitas pelaksanaan Pemilukada. Dalam mencari jawaban sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat,

pencarian terhadap respon masyarakat ini sangat penting, karena logikanya tingkat partisipasi yang tinggi tidak akan terjadi bilamana tidak ada respon yang baik dari masyarakat, begitupun sebaliknya. Begitu juga dengan tingkat kualitas pelaksanaan Pemilukada Kota Tasikmalaya, dimana respon masyarakat ini terkait erat dengan tingkat kecerdasan politik masyarakat kota Tasikmalaya dalam menyikapi Pemilukada, hal tersebut menjadi jawaban dasar berkualitas atau tidaknya pelaksanaan Pemilukada.

Guna mencari data sehingga dicapai sebuah kesimpulan, peneliti menggunakan informan yang ditentukan (*purposive sampling*), yaitu dari beberapa kelompok masyarakat yang dianggap relevan dalam mewarnai proses Pemilukada, diantaranya Ulama, etnis Tionghoa, dan masyarakat yang diwakili oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah yakni pedagang, supir angkutan dan tukang becak.

### ***Etnis Tionghoa***

Sama halnya di beberapa daerah, etnis Tionghoa di Kota Tasikmalaya merupakan etnis minoritas, tetapi dibidang ekonomi menjadi salah satu roda penggerak perekonomian besar yang menggerakkan sektor perdagangan dan jasa. Dari sisi jumlah, tentunya etnis Tionghoa tidak bisa menjadi sumber daya politik yang bisa digiring suaranya untuk mendukung salah satu calon, tetapi sumber daya politik yang menyangkut finansial politik, tentunya dapat diperhitungkan untuk

mempengaruhi dinamika politik lokal di kota Tasikmalaya, mengingat beberapa individu/kelompok pengusaha besar di kota Tasikmalaya dimiliki oleh beberapa orang keturunan Tionghoa yang melebarkan sayap bisnisnya di beberapa proyek, yakni pusat perbelanjaan (*Mall*), pusat hiburan, perumahan dan grosir .

Isu-isu yang berkembang seputar adanya dukungan keuangan dari beberapa pengusaha Tionghoa kepada beberapa politisi atau calon kepala daerah di Kota Tasikmalaya memang sudah menjadi rahasia umum bagi sebagian masyarakat, hal tersebut juga dibenarkan oleh Heriyanto salah satu pengusaha perumahan dari etnis Tionghoa di kota Tasikmalaya.

Adanya dukungan keuangan ini dalam konteks politik, jelas menggambarkan bahwa adanya jalinan kepentingan tertentu, kepentingan tersebut bisa kepentingan beberapa individu dikalangan Tionghoa, atau kepentingan secara umum yang diinginkan oleh seluruh etnis Tionghoa yang ada di kota Tasikmalaya. yang jelas etnis tionghoa memiliki peranan politik yang sangat relevan untuk penelitian dalam mencari jawaban atas respon masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilukada kota Tasikmalaya.

Menurut Heriyanto, kalangan Tionghoa sebagian besar sudah tidak bisa apatis lagi terhadap kegiatan-kegiatan Politik, apalagi di era otonomi daerah, karena mau tidak mau dalam era ini mereka harus bisa mewarnai dinamika politik lokal karena disitulah kepentingan mereka diakomodasikan ditingkat lokal, berbeda

dengan pada saat Orde baru. Bahkan menurutnya seringkali diadakan seminar yang dipelopori oleh kalangan mereka sendiri, seminar tersebut menekankan pentingnya partisipasi politik dan arahan untuk tidak Golput, Heriyanto menjamin persentasenya 50% dari semua warga Tionghoa di kota Tasikmalaya sudah mempunyai kesadaran politik yang tinggi dibanding pada saat Orde Baru. Tetapi ada batasan-batasan tertentu dimana kalangan Tionghoa tidak terlalu menonjolkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik, hanya sebatas melaksanakan hak mereka untuk menentukan pilihan di TPS, termasuk pada pemilihan Walikota Tasikmalaya sebelumnya tahun 2007. Kalaupun ada kontak-kontak dengan elite-elite politik lokal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak terorganisir, artinya hanya beberapa gelintir orang Tionghoa (individu) yang melakukan lobi dan dukungan finansial untuk kepentingan ekonomi politik (jangka pendek), tetapi dia menjamin bahwa hanya dengan segelintir orang yang melakukan lobi-lobi politik, mereka bisa mewakili kepentingan warga Tionghoa secara keseluruhan dan tidak hanya terfokus pada kepentingan ekonomi semata.

Menurut pandangannya, hal serupa juga akan terjadi menjelang Pemilukada kota Tasikmalaya 2012 ini, yaitu hanya segelintir orang Tionghoa yang akan melakukan kontak-kontak dengan beberapa calon Walikota. Mereka kebanyakan pengusaha yang mewakili kepentingan

ekonomi, tetapi dia menjamin walaupun itu dilakukan oleh beberapa orang, kepentingan warga Tionghoa secara keseluruhan bisa tersampaikan.

Dari beberapa calon Walikota yang sudah muncul dan populer, Syarif, Budi Budiman dan Dede, Beberapa calon yang memang intens membangun jaringan dengan warga Tionghoa ini adalah Syarif dan Budi. Tetapi secara umum berkaca dari pelaksanaan Pemilukada kota Tasikmalaya tahun 2007, tidak pernah ada satu calon pun yang datang menyampaikan secara umum mengenai visi dan misinya kepada warga Tionghoa ditingkat akar rumput, artinya pendekatan yang dilakukan oleh salah calon hanya secara individu ditingkat elit.

Menurutnya, kehati-hatian warga tionghoa di kota Tasikmalaya dalam melakukan aktifitas politik lebih didasarkan pada stigma yang berbasis rasial, dimana masih ada jurang pembatas berbasis etnis yang membenturkan antara masyarakat pribumi dan Tionghoa, apalagi setelah terjadinya kerusuhan yang berujung pada permusuhan etnis yakni pembakaran properti milik warga Tionghoa oleh masyarakat pribumi pada tahun 1996 di kota Tasikmalaya. Ini artinya, ada ketakutan bilamana mereka secara terang-terangan melakukan aktifitas politik, akan kembali menyulut stigma-stigma negatif terhadap warga Tionghoa dan menyulut api permusuhan, mengingat politik praktis yang tidak bisa diprediksi, karena bukan tidak mungkin bilamana terlalu aktif dalam politik, politisasi negatif terhadap



warga Tionghoa akan terjadi sebagai akibat manuver politik. Bahkan menurutnya, warga Tionghoa di kota Tasikmalaya cenderung menghindari politik praktis secara langsung, tetapi tidak lantas tidak memperjuangkan kepentingan mereka, kesadaran politik tidak diartikan dengan sejauh mana terlibat dalam politik praktis, tetapi sejauh mana mengakomodasikan kepentingan mereka dengan berbagai pendekatan yang halus.

Dari beberapa pengumpulan data dan hasil wawancara dengan beberapa kalangan Tionghoa, peneliti menyimpulkan bahwa respon masyarakat Tionghoa terhadap pelaksanaan Pemilukada di Kota Tasikmalaya terbagi menjadi tiga pertama apatis, sadar akan hak politiknya dan yang terakhir adalah motivasi kepentingan ekonomi.

Apatis ditandai dengan menghindari pembicaraan politik seputar Pemilukada dan tidak datang ke TPS pada pelaksanaan Pemilukada. Yang kedua sadar akan hak politiknya, yaitu ditandai dengan respek terhadap pembicaraan politik menjelang Pemilukada, mengikuti perkembangan politik menjelang Pemilukada dan datang ke TPS untuk menentukan pilihannya. Dan yang ketiga adalah motivasi ekonomi, yaitu kalangan Tionghoa yang mempunyai kepentingan ekonomi jangka pendek atau jangka panjang sehingga aktif melakukan lobi-lobi bahkan mengucurkan pendanaan terhadap salah satu calon, dan secara tidak langsung terlibat dalam mengkampanyekan calon tersebut dikalangan Tionghoa lainnya.

Tetapi jumlah masyarakat Tionghoa yang apatis dan didominasi oleh kalangan remaja/muda sangat besar dibanding dengan warga Tionghoa yang mempunyai harapan, (sadar politik) apalagi dengan kalangan Tionghoa yang aktif melakukan lobi-lobi politik.

Menurut Heriyanto, sikap apatis ini karena rasa minder sebagai warga minoritas, apalagi stigma negatif yang memang tumbuh subur di Kota Tasikmalaya ini terhadap warga keturunan, menyebabkan hampir sebagian besar warga Tionghoa bersikap acuh tak acuh menyikapi momen-momen politik. Karena menurut pendapat mereka siapapun pemimpinnya, mereka tidak bisa menghilangkan stigma negatif kaum minoritas dan sikap penuh diskriminatif ketika harus berhadapan dengan birokrasi. Stigma bahwa orang Tionghoa adalah kaum berduit, menyebabkan warga Tionghoa dijadikan sapi perah ketika harus berhadapan dengan birokrasi, apalagi menyangkut izin usaha.

Kemudian yang kedua sikap sadar politik. sikap ini diakibatkan adanya rasa pengharapan akan nasib warga Tionghoa ke depan. Ada sebagian warga Tionghoa yang masih menggantungkan harapannya pada pemimpin masa depan. Tolok ukur perubahan itu adalah mengenai calon pemimpin yang akan dekat dengan warga Tionghoa, tidak dekat secara elit bermotif ekonomi politik, tapi dekat secara komunitas yang mampu menghilangkan sekat atau stigma antara Tionghoa dan Pribumi, mampu menghapuskan diskriminasi pelayanan birokrasi dan menghilangkan

bibit-bibit konflik Sara antara Tionghoa dan pribumi yang memang sangat sensitif di kota Tasikmalaya ini.

Dan yang terakhir adalah motif ekonomi. Dimana kelancaran menjalankan usaha dengan cara melakukan investasi politik dan lobi terhadap calon yang akan bertarung pada Pemilukada kota Tasikmalaya 2012. Kelancaran ini bisa diterjemahkan dengan mudahnya mendapat izin, akses, bahkan kerjasama dan tender-tender atau proyek-proyek tertentu.

### ***Ulama***

Predikat Kota Tasikmalaya sebagai kota santri dengan karakter religiusnya yang melekat dan ditandai dengan berdirinya ribuan pesantren dengan tokoh-tokoh ulama kharismatik merupakan kearifan lokal. Kearifan lokal ini menjadikan sosok ulama sangat diperhitungkan dijagad politik Kota Tasikmalaya. Hampir setiap perhelatan politik, termasuk pada Pemilukada 2007, setiap calon yang akan bertarung beramai-ramai mendekati salah satu ulama kharismatik untuk mendapatkan dukungan. Bahkan salah satu pondasi kuat kemenangan Syarif Hidayat pada Pemilukada 2007 adalah para ulama. Beberapa pengamat lokal pun seragam mengatakan bahwa setiap calon yang tidak bisa menjalin jaringan dengan ulama pada Pemilukada 2012 mendatang akan dipastikan tersingkir kalah.

Begitu kuatnya peran politik ulama dalam ranah politik Kota Tasikmalaya disebabkan karena isu-isu populis yang

paling diterima oleh sebagian besar pemilih rasional adalah isu-isu seputar religiusitas dan nilai-nilai Islam, disamping itu jaringan ketokohan ulama sangat kuat dan menguasai simpul-simpul massa sampai ke pelosok-pelosok.

Ulama oleh para politisi yang akan bertarung pada Pemilukada Kota Tasikmalaya 2007 dan 2012 mendatang dijadikan sebuah simbol pencitraan kepada masyarakat. Citra diri yang ingin dibentuk manakala calon tersebut menggandeng ulama adalah citra yang religius dengan komitmen mengangkat nilai-nilai religius Islam. Bahkan ada analisa yang berkembang dikalangan intelektual lokal kota Tasikmalaya, kemenangan H. Syarif pada Pemilukada 2007 lalu adalah janjinya bersama-sama dengan ulama akan membuat Peraturan Daerah berbasis syariah, maka pada 2009 lalu lahirlah Peraturan Daerah nomor 12 tentang Tata Nilai. Bahkan ada ulama mengatakan bahwa Peraturan Daerah tersebut hampir semuanya mengadopsi peraturan hukum kanun di Aceh.

Pemetaan peran ulama dan respon ulama pada Pemilukada kota Tasikmalaya 2012 mendatang disampaikan oleh KH. Mufti, dia adalah Sekretaris Eksekutif Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya. Dia mengatakan bahwa setiap kontestasi politik termasuk Pemilukada, ulama akan selalu melibatkan diri dengan cara memberikan dukungan kepada salah satu calon yang akan bertarung. Dari sisi idealitas, komitmen ulama ketika melibatkan diri pada politik praktis adalah

dalam rangka memperjuangkan atau mengkomodasikan nilai-nilai Islam ke dalam tataran kebijakan.

Pemetaan ulama yang disampaikan oleh KH. Mufti, *Pertama*, ulama kharismatik yang tidak memiliki jabatan struktural di partai politik atau di organisasi politik yang memiliki afiliasi pada kekuatan politik tertentu, kedua ulama kharismatik yang memiliki jabatan struktural di partai politik atau di organisasi politik yang memiliki afiliasi pada kekuatan politik tertentu, ketiga ulama ditingkat akar rumput yang tidak memiliki jabatan struktural di partai politik atau di organisasi politik yang memiliki afiliasi pada kekuatan politik tertentu dan yang keempat adalah ulama akar rumput yang memiliki jabatan struktural di partai politik atau di organisasi politik yang memiliki afiliasi pada kekuatan politik tertentu.

Kelompok ulama pertama merupakan kelompok ulama yang tergolong independen, tapi kemudian pada saat menjelang Pemilukada akan menentukan dukungannya kepada salah satu calon yang dipicu oleh faktor kedekatan, ideologi, komitmen. Dua cara keterlibatan ulama adalah didekati atau mendekati.

Kelompok ulama yang kedua merupakan kelompok ulama yang memang telah memiliki afiliasi politik tertentu, jadi modal politiknya telah dibangun berdasarkan jaringan yang telah terbentuk, entah di partai politik atau organisasi politik tertentu. Walaupun pada kenyataannya berkaca pada Pemilukada 2007 berdasarkan

konstelasi politik yang terus berkembang dukungan ulama kelompok ini tidak melulu berdasarkan jaringan partai politik atau organisasi politik yang sudah dibangun, tapi dukungan itu berdasarkan pendekatan ketokohan calon yang akan bertarung.

Kelompok ulama yang ketiga, sama halnya dengan kelompok ulama yang pertama, mereka cenderung independen, tetapi karena hirarkis jaringan ulama dari atas hingga ke akar rumput, akhirnya ulama ditingkat akar rumput ini akan melibatkan diri untuk dukung mendukung kepada salah satu calon. Tapi sebagian besar ulama akar rumput ini tidak pernah melibatkan diri secara aktif dalam mendukung salah satu calon, sifatnya hanya sekedar memfasilitasi calon dengan masyarakat ketika calon tersebut melakukan safari politik ke daerahnya, karena seperti biasanya bila salah satu calon ingin bersafari politik ke pelosok daerah, orang pertama yang dikunjungi atau diminta memfasilitasi adalah ulama.

Dan terakhir adalah kelompok ulama keempat. Kelompok ulama ini sama halnya dengan kelompok ulama yang kedua, mereka sudah memiliki afiliasi politik tertentu sehingga akan mudah ditebak kepada siapa ulama itu memberikan dukungan. Tapi lagi-lagi karena adanya perubahan dinamika politik yang ada, ulama ditingkat akar rumput ini memberikan dukungan dengan bebas tanpa adanya keterikatan dengan partai atau organisasi politik yang mempunyai afiliasi dengan calon tertentu.

Dari pemetaan diatas, bisa disimpulkan bahwa respon ulama menjelang Pemilu 2012 sama halnya respon ulama pada Pemilu 2007, bahwa dalam setiap kontelasi politik dalam tataran idealitas para ulama ingin memperjuangkan nilai-nilai religius, Tetapi karena berbagai dinamika dan kepentingan-kepentingan politik tertentu, tidak ada batasan yang jelas antara perjuangan mengakomodasikan nilai-nilai religius dengan perjuangan mendapatkan kekuasaan.

Bahkan yang terjadi adalah pemanfaatan instan kekuatan ulama. Sebagai indikasinya merujuk pada Pemilu 2007, ketika H. Syarif menang seolah komunikasi antara H. Syarif sebagai Walikota dengan ulama terputus, hal ini ditandai dengan menjamurnya karaoke yang mendapat izin dari pemerintah yang menjadi kontroversi, Dalam kasus ini kita bisa melihat bagaimana terputusnya komunikasi politik dengan ulama.

### ***Sopir Angkutan Kota***

Dalam penelitian ini, respon masyarakat ditingkat akar rumput diwakili oleh sopir angkutan dan pedagang pasar. untuk sopir angkot, peneliti memilih angkutan kota jurusan 09, karena jurusan 09 ini memiliki dua jalur Trayek, yaitu Trayek Kota dan Trayek pasar. Secara sosial baik sopir angkot maupun pedagang pasar memiliki keaktifan sosial yang tinggi karena setiap hari mereka berhubungan dengan berbagai macam orang sebagai pengguna jasa angkutan dan pembeli. Selain itu,

sopir angkot dan pedagang pasar memiliki organisasi formal seperti Organda dan Himpunan Pedagang Pasar. organisasi-organisasi profesi ini secara formal tidak memiliki afiliasi politik tertentu, tetapi merujuk pada Pemilu Kota Tasikmalaya tahun 2007, organisasi profesi sopir angkot dan pedagang pasar terlibat dalam hal dukung dukung mendukung calon.

Ketua Jurusan Angkutan Kota 09 Ahdi mengatakan, keterlibatan organisasi angkutan dalam Pemilu Kota Tasikmalaya 2007 khususnya jalur 09 ada dua cara. *Pertama*, ketika tokoh kunci atau orang yang dianggap tokoh, sesepuh jalur didekati oleh orang dari tim sukses pasangan calon. *Kedua*, ada beberapa pengurus, tokoh, sesepuh atau bahkan sopir memang sudah sejak lama menjadi simpatisan partai tertentu kemudian masing-masing memberi pengaruh kepada sopir yang lain. Pengaruh bisa secara lisan atau dengan pemberian yang sifatnya materi seperti kaos, jaket dan amplop. Bahkan dalam dukung dukung ini sering kali terjadi konflik dalam satu jurusan angkutan, karena dalam satu jurusan terdapat beberapa tokoh atau sopir yang berbeda dalam memberikan dukungan, tidak terpaku pada salah satu calon saja. Menurut prediksinya, pada Pemilu Kota Tasikmalaya 2012 mendatang, cara-cara seperti ini pasti akan terjadi.

Dari hasil pengamatannya, organisasi angkutan yang mewakili seluruh sopir tidak pernah memiliki agenda politik yang jelas dalam kaitannya dukung dukung mendukung calon, yang ada hanyalah

kepentingan pragmatis yang sifatnya jangka pendek. Mereka rata-rata tidak mengetahui apa makna dan esensi yang bisa dijadikan alat perjuangan dalam rangka mengakomodasikan kepentingan mereka yang berprofesi sebagai sopir. Bagi kebanyakan sopir, yang penting mereka mendapatkan kaos, jaket, kalender dan amplop, mereka akan mudah memberikan dukungan. Termasuk dalam menyikapi Pemilukada Kota Tasikmalaya tahun 2012.

Gambaran akan nasib mereka kedepan agar lebih baik rata-rata dapat dipahami oleh para sopir Angkutan Umum, dan mereka sangat menyadari bagaimana pentingnya memilih pemimpin yang baik yang erat kaitannya dengan harapan akan masa depan mereka. Artinya secara ekonomi mereka mempunyai harapan agar hasil Pemilukada ini bisa merubah nasib mereka dengan menghasilkan pemimpin yang baik. Tetapi keyakinan ini tidak bisa bertahan manakala mereka diiming-imingi oleh kaos, jaket, kalender dan amplop, karena para sopir Angkot ini merasa pesimis bahkan apatis bahwa Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012 bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas yang bisa memberikan perubahan ekonomi dan berpihak pada sopir angkot, sehingga prinsip mereka dalam memilih adalah "*Kahartos, karaos*". Istilah dalam Bahasa Sunda ini menggambarkan bahwa begitu pragmatisnya pendekatan mereka dalam menentukan dukungan atau pilihan. Dukungan mereka hanya dinilai dengan hal yang sifatnya materi-kebendaan yang

sifatnya jangka pendek.

Disamping itu juga kenapa para sopir Angkot ini menggunakan pendekatan pragmatis disamping rasa pesimis dan apatis, yaitu keterbatasan mereka dalam mengakses informasi seputar profil calon, Partai Politik yang mengusungnya, landasan ideologinya termasuk Visi-Misi masing-masing calon, sehingga mereka tidak bisa memetakan secara rasional kemana mereka akan mendukung atau menentukan pilihan. Mereka selama ini mengenal calon yang memang sudah familiar, seperti tokoh atau orang yang dianggap sebagai orang terpendang yang memang selama ini sudah banyak diekspos oleh media lokal seperti H. Budi Budiman dan H. Dede sudrajat. Ditambah secara visualisasi mereka bisa melihat *baligho-baligho* calon yang sudah terpasang.

### ***Pedagang Pasar***

Sama halnya dengan sopir Angkot, pedagang pasar juga memiliki organisasi, Himpunan Pedagang Pasar, dan kecenderungannya juga sama organisasi tersebut akan melibatkan diri dengan mendukung salah satu calon. Peneliti mewawancarai 3 pedagang pasar yang mewakili pedagang pasar Pancasila, Pasar Rel dan Pasar Cikurubuk.

Dari hasil wawancara dengan keempat pedagang tersebut, para pedagang pasar masih menanggapi dingin, disamping belum ada sosialisasi yang memadai tentang pelaksanaan Pemilukada, mereka juga cenderung tidak memiliki informasi yang

memadai seputar Pemilu Kota, hampir semua pedagang pasar tidak mengetahui kapan Pemilu akan dilaksanakan, dan dari semua bakal calon yang ada, rata-rata mereka hanya tahu tiga tokoh yang akan bertarung yang memang tokoh-tokoh lama, yaitu H. Budi Budiman, H. Dede Sudrajat dan H. Syarif Hidayat.

Hampir semua pedagang pasar memiliki rasa pesimistis, bahwa Pemilu Kota Tasikmalaya 2012, sama halnya dengan Pemilu Kota Tasikmalaya 2007 tidak akan memberikan pengaruh apa-apa bagi kehidupan para pedagang pasar. menurut istilah mereka, mereka seperti mendorong mobil mogok, setelah mobil itu melaju, yang mendorong malah ditinggalkan.

Dari wawancara mendalam, peneliti menyimpulkan bahwa kesadaran politik cukup tinggi. Indikatornya adalah mereka mengetahui esensi dari pada proses pergantian pemimpin politik lewat Pemilu, yakni Pemilu adalah proses mencari pemimpin yang ideal dimana aksesnya bisa merubah kondisi masyarakat kedalam kehidupan yang lebih baik. Tapi kesadaran tersebut diikuti dengan perasaan pesimistis.

### **Simpulan**

Dari uraian di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah *Pertama*, Dinamika Pemilu Kota Tasikmalaya yang semula melahirkan tiga kekuatan utama antara kekuatan Koalisi Masyarakat Madani dengan “jagonya” Budi Budiman,

Koalisi Peduli Umat dengan “jagonya” Syarif Hidayat dan Koalisi 21 dengan “jagonya” Dede Sudrajat telah melahirkan *main-stream* baru setelah manuver yang dilakukan oleh Dede Sudrajat yang merapat ke KMM. Sehingga menjadi dua *main-stream* utama yaitu Koalisi Masyarakat Madani yang mengusung Budi-Dede dan Koalisi Peduli Umat yang mengusung H. Syarif. Konstelasi kekuatan tersebut dilihat dari keduanya sangat gencar dalam upaya pengenalan calon, popularitas dan kharisma, ekspos media dan mesin parpol. Jika ditimbang kedua kekuatan sebenarnya berimbang dan akan bertarung sangat ketat dalam Pemilu Juni besok. Sedangkan untuk independen cenderung figurinya kurang dikenal, ekspos media juga kurang.

*Kedua*, Respon masyarakat yang diwakili oleh masyarakat Tonghoa, Ulama, sopir Angkot dan pedagang pasar, dalam penelitian mengindikasikan beberapa klasifikasi dan deskripsi yang berbeda. Namun demikian, hasil penelitian ini, semua deskripsi dan klasifikasi dapat disatukan sehingga menjadi sebuah deskripsi yang dapat diterjemahkan menjadi satu kesimpulan.

Untuk masyarakat Tonghoa, dalam penelitian dimulai dengan keterkaitan beberapa individu dan kelompok yang melakukan pendekatan di tingkat elit. Relasi ini menunjukkan bahwa pada tingkatan elit (politisi dan Tonghoa), membangun jaringan politik dengan calon yang akan bertarung pada Pemilu Kota Tasikmalaya. Jaringan ini terjalin

dengan tujuan terciptanya relasi ekonomi politik yang masing-masing pihak memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Dan ini bisa merepresentasikan kepentingan-kepentingan seluruh masyarakat (akar rumput) Tionghoa yang ada di Kota Tasikmalaya, walaupun dari segi kuantitas tidak begitu diperhatikan sebagai sumber daya politik (dukungan massa/suara), tapi secara keseluruhan dan sebagai gambaran respons di tataran akar rumput, responnya 50 persen dari keseluruhan masyarakat Tionghoa yang ada di Kota Tasikmalaya sudah memiliki kesadaran politik. Artinya respons akar rumput masyarakat Tionghoa cenderung meningkat dalam menyikapi Pemilu Kota Tasikmalaya 2012.

Ulama memiliki ikatan yang kompleks dalam struktur sosial politik Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini terlihat, segelintir elit/tokoh ulama, dari sisi idealitas dijadikan jalan untuk mengakomodasikan nilai-nilai Islam sebagai legitimasi dalam membangun jaringan dengan beberapa calon yang akan bersaing pada Pemilu Kota Tasikmalaya 2012. Artinya, dukung mendukung yang dilakukan oleh Ulama selalu dilandasi legitimasi religiusitas,

begitu juga dalam tataran akar rumput. Ulama memiliki ikatan kharismatik dengan pendukungnya, hal ini dimanfaatkan (relasi Ulama dan politisi/calon) sebagai jalan meraih dukungan.

Sopir Angkot dan para pedagang pasar memiliki kesadaran bahwa Pemilu Kota Tasikmalaya 2012 merupakan proses memilih calon pemimpin yang betul-betul bisa berjuang untuk kepentingan masyarakat. Tapi keyakinan ini ditutupi dengan perasaan pesimis dan apatis. Mereka berkaca pada perhelatan-perhelatan politik termasuk Pemilu Tahun 2007, bahwa setiap pergantian pemimpin tidak memberikan perubahan yang baik, khususnya bagi kehidupan mereka. Walaupun komunitas-komunitas mereka sering dimanfaatkan sebagai sumber daya dalam melakukan dukung mendukung lewat organisasi-organisasi profesi yang mereka miliki, mereka tidak pernah memiliki tujuan politik yang jelas, atau tidak memiliki kontrak politik yang jelas yang bisa mengakomodasikan kepentingan mereka, tapi hanya pendekatan jangka pendek yang sifatnya pragmatis.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kleden dan Haris, Syamsuddin, 2005, *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1980, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Moleong, L. J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

- Newton, Ken and Van Deth, Jan W. (2005) *Foundations of Comparative Politics*, Cambridge University Press. Cambridge.
- Philpott, Simon, 2003, *Meruntuhkan Indonesia : Politik Post-Kolonial dan Otoriterianisme*, LkiS, Yogyakarta.
- Pradhanawati, 2005, *Pilkada Langsung : Tradisi Baru Demokrasi Lokal*, KOMPIP, Semarang.
- Saifudin Fedyani, Akhmad, 1990, *Panduan Dasar Ilmu-Ilmu Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sumber Lain :**
- Lingkar Survai Indonesia, *Mesin Parpol dalam Pilkada*, Edisi 15 Juli 2008.
- Radar Tasikmalaya, Edisi November sampai 10 Maret 2012.